

**Pengaruh Analisis Standar Belanja, Standar Pelayanan Minimal dan Indikator Kinerja terhadap Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang)**

**Wenni Anggita**

Universitas Bangka Belitung  
Email : wanggitha@ymail.com

***Abstract***

*This study aims to determine how much influence from the standard variable expenditure analysis, minimum service standards and performance indicators against which performance-based budgeting in the city Pangkalpinang investigated. This research is a quantitative survey approach. Total sample of 72 people is obtained from a population of 84 people who were taken from 24 SKPD Pangkalpinang city. Using the census sample retrieval method. The independent variables consist of the standard analysis of expenditure (X1), minimum service standards (X2) and indicator kinerja (X3) while the dependent variable is the performance-based budgeting (Y). Tests using the instrument validity and reliability testing. The method of data analysis using multiple linear regression with F test and T test.*

*The results showed that the standard variable expenditure analysis no effect partially on performance-based budgeting. For variable minimum service standards and performance indicators affect both partially on performance-based budgeting. Overall the standard variable expenditure analysis, minimum service standards and performance indicators have a positive and significant impact on the performance-based budgeting.*

***Keywords: Budget, Performance, Standards Expenditure Analysis, Minimum Service Standards and Performance Indicators.***

## **A. PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Transparansi dan akuntabilitas publik pada era otonomi daerah telah menjadi tujuan terpenting dari reformasi sektor publik di Indonesia. Pada dasarnya, transparansi dan akuntabilitas publik tersebut tidak hanya menjadi masalah negara berkembang seperti Indonesia saja, namun negara yang sudah maju sekalipun terus berusaha memperbaiki praktek akuntabilitas lembaga sektor publiknya. Di Indonesia, komitmen terhadap perbaikan pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas publik mulai disuarakan sejak otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal tersebut adalah untuk menciptakan *good governance*, yaitu tata kelola pemerintahan yang baik yang ditandai dengan adanya transparansi, akuntabilitas publik, partisipasi, efisiensi dan efektivitas, serta penguatan hukum.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efisien dan efektif, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum bagi masyarakat.

Anggaran berbasis kinerja (ABK) merupakan sebuah pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil atau manfaat yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Benar Baik Sembiring (2009) mengatakan bahwa anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan. Manfaat tersebut dideskripsikan pada seperangkat tujuan dan dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja.

Untuk melakukan suatu pengukuran kinerja perlu ditetapkan indikator-indikator terlebih dahulu antara lain indikator masukan (*input*) berupa dana, sumber daya manusia dan metode kerja. Agar input dapat diinformasikan dengan akurat dalam suatu anggaran, maka perlu dilakukan penilaian terhadap kewajarannya. Agar penerapan penganggaran berbasis kinerja dapat dioperasionalkan maka penganggaran berbasis kinerja harus menggunakan beberapa instrumen diantaranya standar analisis belanja, standar pelayanan minimal dan indikator kinerja.

Penelitian yang dilakukan oleh Benar (2009) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah berbasis kinerja menunjukkan bahwa komponen seluruh organisasi, penyempurnaan sistem, administrasi, sumber daya yang cukup, penghargaan dan sanksi yang tegas berpengaruh positif terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja. Penelitian Asropi (2007) menunjukkan bahwa indikator kinerja berpengaruh positif terhadap sistem pelayanan publik. Nuraeni (2009) tentang proses penyusunan anggaran berbasis kinerja pada pemerintah Kabupaten Temanggung menyimpulkan bahwa belum ada kejelasan tentang penggunaan standar analisis biaya dalam proses penyusunan anggaran berbasis kinerja pada pemerintah kabupaten temanggung, namun proses penyusunan anggaran berbasis kinerja tetap berjalan.

## **Rumusan Masalah**

1. Apakah Analisis Standar Belanja (ASB) berpengaruh terhadap penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja di Pemerintah KotaPangkalpinang?
2. Apakah Standar Pelayanan Minimal (SPM) berpengaruh terhadap penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja di Pemerintah KotaPangkalpinang?
3. Apakah Indikator Kinerja atau berpengaruh terhadap penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja di Pemerintah KotaPangkalpinang?
4. Apakah Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja berpengaruh secara simultan terhadap penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja di Pemerintah KotaPangkalpinang?

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Analisis Standar Belanja**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan perlunya Analisis Standar Belanja dalam pengelolaan keuangan daerah. Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Analisis Standar Belanja merupakan salah satu elemen utama untuk penganggaran yang berbasis kinerja dalam rangka pencapaian pengelolaan keuangan yang ekonomis, efisien dan efektif.

### **Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sesuai dengan amanat Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang nomor 65 tahun 2005, Standar Pelayanan Minimal (SPM) diterapkan pada Urusan Wajib Daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

### **Indikator Kinerja**

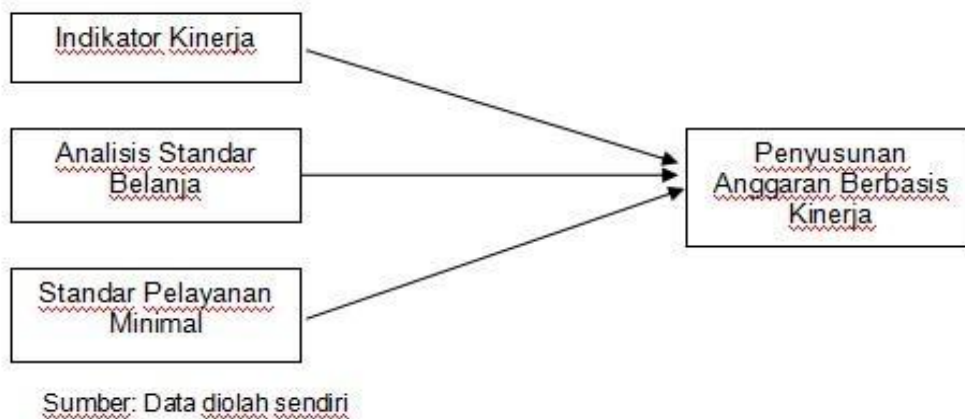
Menurut Green (1992) indikator adalah variabel yang mengindikasikan atau menunjukkan satu kecenderungan situasi, yang dapat dipergunakan untuk mengukur perubahan. Menurut Wilson & Sapanuchart (1993) indikator merupakan pengukuran tidak langsung suatu peristiwa atau kondisi. Menurut Tjitrosoemarto (2011) indikator

kinerja merupakan gambaran, ciri-ciri, atau ukuran yang menggambarkan sttus kinerja yang dihasilkan suatu kegiatan atau suatu proses. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yangditetapkan.

### Anggaran Berbasis Kinerja

Dalam penjelasan PP Nomor 58 Tahun 2005 dinyatakan bahwa anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau *output* dari alokasi biaya atau *input* yang dikeluarkan. Berdasarkan pengertian tersebut, setiap *input* yang ditetapkan dalam anggaran harus dapat diukur hasilnya dan pengukuran hasil bukan pada besarnya dana yang telah dihabiskan tetapi berdasarkan pada tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pengertian anggaran berbasis kinerja Suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau *output* dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang telahditetapkan.

### Kerangka Pemikiran



### Hipotesis Penelitian

- H<sub>1</sub>:** Analisis Standar Belanja (ASB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
- H<sub>2</sub>:** Standar Pelayanan Minimal (SPM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja.
- H<sub>3</sub>:** Indikator Kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja.
- H<sub>4</sub>:** Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Indikator Kinerja secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyusunan Anggaran BerbasisKinerja.

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya, sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang yang berpusat di Komplek Perkantoran Walikota Pangkalpinang di Jalan Rasakunda Bukit Intan Pangkalpinang.

#### Populasi dan Sampel

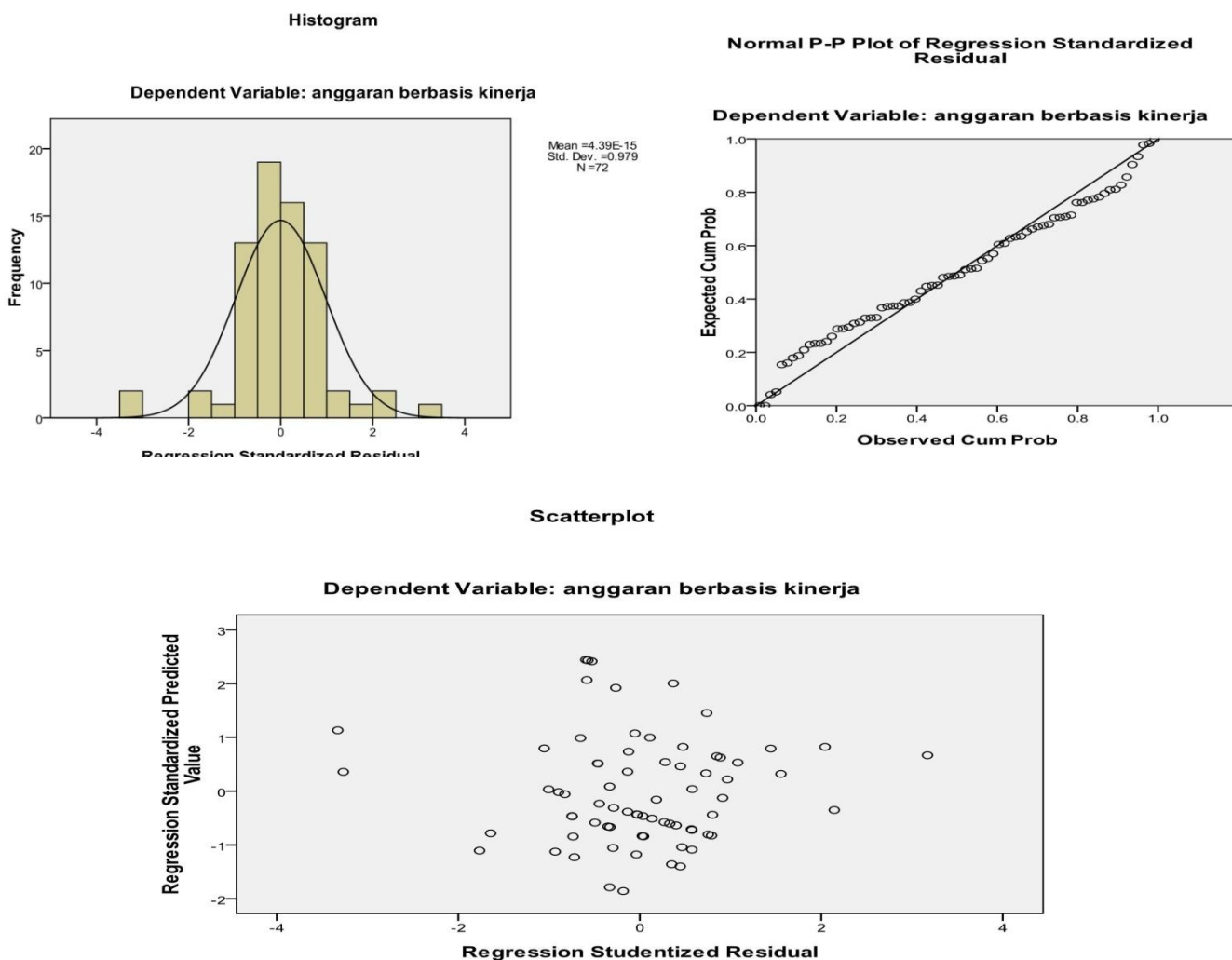
Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah kota Pangkalpinang yang terdiri dari 13 Dinas, 5 Badan dan 6 Kantor. Metode Pengambilan Sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *sensus* yaitu seluruh populasi dijadikan sampel dalam penelitian. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini terlihat pada tabel dibawah ini:

No	Jabatan	Jumlah
1	PejabatStruktural	24Orang
2	KepalaBidangKeuangan	24Orang
3	KepalaBidangPerencanaan	23Orang
4	KepalaBidangPelayanan	13Orang
<b>Jumlah</b>		<b>84Orang</b>

Dalam penelitian ini peneliti menyebarkan kuisisioner kepada 84 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang dan kuisisioner yang kembali berjumlah 72 dan jumlah ini dijadikan sampel dalam penelitian ini. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis regresi berganda dan untuk mengolah data penulis menggunakan program aplikasi komputer *SPSS 17.00 forWindows*.

#### D. HASIL ANALISIS DATA

Dari gambar histogram di atas dapat dilihat bahwa garis yang dihasilkan berbentuk parabola dimana antara sisi kanan dan kiri memiliki besar yang sama sehingga dapat disimpulkan bahwa data memiliki distribusi normal.



Dari gambar diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi linier berganda dalam penelitian ini tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

#### Analisis Regresi Berganda

Uji regresi berganda ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh standar analisis belanja, standar pelayanan minimal dan indikator kinerja terhadap penyusunan anggaran berbasis kinerja di Pemerintah Kota Pangkalpinang. Maka dapat dihasilkan persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$ABK = -3,671 + 0,25ASB + 0,803SPM + 0,138IK$$

**Tabel IV.3.4 Hasil Uji Simultan Atau Uji F**

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	507.351	3	169.117	100.942	.000 <sup>a</sup>
Residual	113.927	68	1.675		
Total	621.278	71			

a. Predictors: (Constant), indikator kinerja, analisis standar belanja, standar pelayanan minimal

b. Dependent Variable: anggaran berbasis kinerja

Dari hasil perhitungan uji F, dapat dilihat bahwa  $F_{hitung}$  100,942 dan  $F_{tabel}$  2.74 dengan  $df_1$  = derajat pembilangan 2 dan  $df_2$  = derajat penyebut 72 untuk taraf 5%. Berarti  $F_{hitung} > F_{tabel}$ . Dan nilai  $p = 0,000 < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima berarti variabel standar analisis belanja, standar pelayanan minimal dan indikator kinerja secara bersamaan atau simultan mempengaruhi penyusunan anggaran berbasis kinerja secara signifikan.

## HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS

### **Pengaruh Analisis Standar Belanja terhadap Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja.**

Berdasarkan hasil analisis data dan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel standar analisis belanja merupakan variabel yang tidak mempengaruhi secara parsial terhadap penyusunan anggaran berbasis kinerja. Hal ini dikarenakan sebagian besar Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintahan Kota Pangkalpinang belum memahami penerapan dari standar analisis belanja sehingga implementasinya dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja masih kurang efektif.

### **Pengaruh Standar Pelayanan Minimal terhadap Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja**

Variabel Standar pelayanan minimal merupakan variabel yang berpengaruh secara parsial terhadap keberhasilan penyusunan anggaran berbasis kinerja dengan  $t_{hitung}$  13.774 >  $t_{tabel}$  1.99495, sehingga  $H_2$  yang berbunyi ada pengaruh yang signifikan antara Standar pelayanan minimal terhadap penyusunan anggaran berbasis kinerja diterima dan  $H_0$  ditolak.

### **Pengaruh Indikator Kinerja terhadap Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja**

Variabel Indikator Kinerja merupakan variabel yang berpengaruh secara parsial terhadap keberhasilan penyusunan anggaran berbasis kinerja dengan  $t_{hitung}$  2.601 >  $t_{tabel}$

1.99495, sehingga  $H_3$  yang berbunyi ada pengaruh yang signifikan antara faktor antara indikator kinerja terhadap penyusunan anggaran berbasis kinerja diterima dan  $H_0$  ditolak.

Dilihat dari tabel tersebut koefisien determinasi menunjukkan angka R Square 0.817 atau 81.7% yang berarti variabel penyusunan anggaran berbasis kinerja dapat dijelaskan oleh variabel analisis standar belanja, standar pelayanan minimal dan indikator kinerja. Dan sisanya 0,183 atau 18.3 % dapat dijelaskan oleh variabel lainnya yang diluarpenelitian.

## **E. SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

1. Variabel Analisis Standar Belanja tidak berpengaruh terhadap penyusunan anggaran berbasis kinerja di Pemerintah KotaPangkalpinang.
2. Variabel Standar Pelayanan Minimal berpengaruh terhadap penyusunan anggaran berbasis kinerja di Pemerintah KotaPangkalpinang.
3. Variabel Indikator Kinerja berpengaruh secara signifikan terhadap penyusunan anggaran berbasis kinerja di Pemerintah KotaPangkalpinang.

### **Saran**

1. Setiap satuan kerja perangkat daerah harus menempatkan sumber daya manusia yang kompeten dalam di bidang anggaran yang memahami instrumen-instrumen penyusunan anggaran berbasis kinerja dengan baik agar setiap instrumen tersebut dapat saling melengkapi dan lebih efektif.
2. Penelitian-penelitian serupa di masa datang harus ditingkatkan untuk memantau perkembangan yang terjadi di pemerintahan daerah. Tidak hanya untuk wilayah Kota namun Kabupaten dan Provinsi juga harus dipantau agar kinerja dari setiap satuan kerja perangkat daerah dapat dipantaupeningkatannya.
3. Dalam penelitian ini variabel yang paling dominan adalah variabel standar pelayanan minimal, jadi untuk variabel analisis standar belanja dan indikator kinerja SKPD harus lebih mengoptimal kinerjanya sehingga tujuan dari penyusunan anggaran berbasis kinerja dapat tercapai secara optimal. Untuk variabel analisis standar belanja diharapkan pemerintah dapat lebih mengoptimalkan secara khusus untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi sehingga anggaran berbasis kinerja dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien dan ekonomis.



4. Setiap kegiatan atau program kegiatan yang dianggarkan SKPD harus menerapkan indikator kinerja dengan lebih jelas agar sasaran dari program tersebut dapat dicapai.
5. Standar pelayanan dan indikator yang dituangkan dalam anggaran harus mendapat respon dari masyarakat dengan melakukan survey untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan dan manfaat yang dirasakan masyarakat atas terlaksananya suatu program kegiatan SKPD

## DAFTAR PUSTAKA

- BAPPENAS, Paparan. *Restrukturisasi Program dan Kegiatan, disampaikan pada Bimbingan Teknis Penyusunan LAKIP IPDN*, di Subang tanggal 31 Maret 2010.
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik. (2006). *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Yogyakarta : BPFE.
- Hariadi, Pramono.dkk. (2010). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Haris, Syamsuddin. (2007). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI Press.
- Huda, Ni'matul. (2009). *Anggaran Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta:NUSAMEDIA.
- Jones, Rowan, dan Maurice Pendlebury. (2000). *Public Sector Accounting*. Fifth Edition. Prentice Hall.
- Kartika, HA. (2003). *Anggaran Berbasis Kinerja dan Akuntabilitas Publik*. Makalah. Kuncoro, Mudrajat. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta : Erlangga. Mardiasmo. (2004) *.Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta:ANDI.
- Priyatno,Duwi.(2009). *SPSS Untuk Analisis Korelasi Regresi dan Multivariate*.Yogyakarta: GAVA MEDIA.
- Priyatno, Duwi. (2010). *Paham Analisa Statistik Data dengan SPSS*. Yogyakarta: Mediakom.
- Rachmat. (2010). *Akuntansi Pemerintahan*. Bandung: Pustaka Setia. Riduan. (2010). *Dasar-dasar statistika*. Bandung : Alfabeta.
- Sembiring, Benar Baik. (2009). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berbasis Kinerja di Kabupaten Karo*. Tesis. Universitas Sumatera Utara.
- Shim, Jae K. Dan Joel G.Siegel. (2000). *Budgetting*. Jakarta: Erlangga.
- Sunarno, Dr.H.Siswanto. (2008). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suprasto H, Bambang. (2003). *Peluang dan Tantangan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja*. Buletin Studi Ekonomi. ISSN.
- Taufiq Ritonga, Irwan. (2010). *Analisis Standar Belanja*. Yogyakarta: ISBN
- \_\_\_\_\_. (2001). Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001.TentangPelaporan PemerintahDaerah.
- \_\_\_\_\_. (2003). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun2003.Tentang KeuanganNegara.
- \_\_\_\_\_. (2004). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004,tentang PemerintahDaerah.

- \_\_\_\_\_. (2004). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- \_\_\_\_\_. (2004). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- \_\_\_\_\_. (2005). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2005. Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- \_\_\_\_\_. (2007). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2007. Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal.
- \_\_\_\_\_. (2007). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2007. Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
- \_\_\_\_\_. (2009). Peraturan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009. Tentang Pelayanan Publik.
- <http://anggaranberbasiskinerja.com>[http://bppt.go.id/buku\\_2\\_penganggaran](http://bppt.go.id/buku_2_penganggaran)<http://repository.usu.ac.id><http://daryono.staff.gunadarma.ac.id/Download/files/7586/BAB+7-+PENGANGGARAN.doc>. <http://oc.its.ac.id/jurusan.php?fid=1&jid=3>
- <http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2023657-pengertian-penelitian-kuantitatif/#ixzz21V4IJ0Jc>
- <http://www.anggaran.depkeu.go.id/peraturan/PMK%2037%20-%202012%20-%20SB%202013.pdf>